



MUKOMUKO

SUMBER BERITA

SENIN, 18 SEPTEMBER 2023

x	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Benang Kusut RSUD Mukomuko

KEJARI Mukomuko tidak terfokus pada satu jenis kegiatan pengeluaran keuangan saja. Namun seluruh bentuk penggunaan anggaran dikupas satu persatu. Di awal tahun 2023 paskadinaikan status Tipikor keuangan RSUD Mukomuko menjadi penyidikan, Kejari Mukomuko melakukan penyitaan berkas dokumen-dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran manajemen RSUD Mukomuko dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 Desember.

Dari dokumen yang disita Penyidik Kejari Mukomuko maraton melakukan pemanggilan saksi untuk dimintai keterangan berkaitan isi dari laporan, baik uang masuk, uang keluar, permintaan barang, dan kebutuhan lainnya. Berjalannya pemeriksaan tersebut penyidik menemukan adanya pesanan obat kepada pihak rekanan yang belum dibayarkan, begitu juga dengan pengadaan barang habis pakai, dan alat kesehatan (Alkes).

Tak hanya disitu Penyidik juga melakukan pemanggilan terhadap pihak BPJS berkaitan dengan dana klaim BPJS. Kemungkinan juga memiliki kejanggalan. Selanjutnya baru saja penyidik Kejari Mukomuko melakukan pencocokan data penerima gaji dan honor terhadap 500 pegawai RSUD baik medis dan non medis. Alhasil kembali di temukan kejanggalan penerima honor dan gaji fiktif.

Kepala Kejari Mukomuko Rudi Iskandar SH, MH melalui Kasi Pidsus Agung Malik Hakim SH, MH mengatakan, dalam pengungkapan kasus dugaan tindak pidana Korupsi keuangan RSUD Mukomuko ini dilakukan Kejari Mukomuko secara transparan, mulai dari penyitaan dokumen laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan RSUD hingga ke pemeriksaan saksi-saksi.

Tentunya tidak terlepas dari dukungan yang sudah di berikan setiap pihak, dalam pengungkapan kasus ini. Untuk pihak-pihak yang telah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik sebagai saksi. Mulai dari seluruh pimpinan RSUD Mukomuko, bendahara uang masuk dan bendahara pengeluaran, pimpinan pemasok obat, dan alkes, pimpinan BPJS Kesehatan Mukomuko, dan seluruh pegawai RSUD penerima gaji dan honor terkait dana Cleam BPJS yang di ajukan RSUD Mukomuko kepada pihak BPJS, sesuai dengan dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan tahun 2016 sampai dengan Desember tahun 2021.

“Setiap kali dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, penyidik selalu mendapatkan informasi baru yang mengarah ke upaya Tipikor. Dalam kasus ini penyidik harus teliti dan sedikit memakan waktu, agar tidak ada kerugian negara (KN) yang terlewatkan,” katanya.

Agung menambahkan, selain itu tim Kejari Mukomuko telah melakukan ekspose untuk rangkaian proses penghitungan KN ke Auditor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu, atas data yang didapat dari penyidik Kejari Mukomuko dari proses pemeriksaan. Sebelumnya tahapan penghitungan KN ini sempat direncanakan melibatkan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) Bengkulu, namun saat ini BPKP Bengkulu tengah full perkara baik dari Kejati, Kejari, dan Polri. Maka dari penghitungan KN ini melibatkan auditor Kejati, karena Auditor ini juga biasa menjadi tim ahli dalam persidangan.

“Untuk penghitungan KN ini kemungkinan akan menghabiskan waktu paling cepat satu bulan, kalau kita mesti menunggu lagi otomatis akan tertunda lagi. Maka dari itu kita meminta bantuan

Auditor Kejati, sembari itu juga untuk pemeriksaan saksi dalam dugaan Tipikor RSUD Mukomuko juga terus berjalan,” ujarnya.

Lanjutnya, untuk nama-nama bakal ditetapkan sebagai calon tersangka, tentu saja sudah dikantongi penyidik, namun untuk penetapan siapa saja dan berapa jumlah tersangka, masih menunggu hasil akhir perhitungan jumlah KN. Sebab tidak menutup kemungkinan calon tersangka akan terus bertambah jika telah dilakukan penghitungan KN.

“Kami belum bisa di publis siapa saja calon tersangka ini karena masih menunggu hasil KN nya. Sebab tidak menutup kemungkinan akan terus bertambah mengingat Tipikor ini telah terjadi selama enam tahun,” tandasnya.

Sebelumnya Direktur RSUD Mukomuko Syafriadi mengatakan, dengan senang hati akan membantu proses hukum yang tengah berjalan berkaitan dengan Tipikor keuangan RSUD Mukomuko. Apa yang menjadi kebutuhan pihak Kejaksaan, manajemen RSUD akan siap membantu. Selain itu juga, meskipun ada kegiatan pemeriksaan karyawan rumah sakit, namun pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan seperti biasa.

“Ada 520 orang karyawan dan pegawai di rumah sakit ini, namun ada nama ganda sehingga jumlah riil personel rumah sakit ini sebenarnya hanya 500 orang, itu tenaga medis dan non medis sudah seluruhnya,” katanya

Ia menyampaikan juga, berkaitan dengan adanya karyawan yang sudah tidak bekerja di rumah sakit ini, pihaknya tetap akan menghubungi yang bersangkutan untuk datang dan menjalani pemeriksaan, sesuai arahan pihak Kejaksaan. (pir)